



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Sekretariat Kabupaten Kutai Barat terhadap penggunaan mobil dinas pegawai negeri sipil daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan secara menyeluruh oleh Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Barat karena seluruh rangkaian pengawasan terhadap penggunaan barang milik daerah khususnya mobil dinas dikoordinir dan diawasi secara langsung oleh sub-sub bagian yang berada dalam lingkup Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Sekretariat Kabupaten Kutai Barat adalah bentuk pengawasan langsung. Dalam prakteknya,

pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah dilakukan melalui beberapa tindakan antara lain :

- a.) Membagi mobil-mobil dinas sesuai dengan peruntukannya bagi masing-masing pegawai negeri sipil. Mobil-mobil dinas tersebut terbagi menjadi mobil dinas operasional jabatan dan mobil operasional lapangan.
- b.) Melakukan pemeliharaan terhadap mobil dengan cara memeriksa kondisi mesin mobil secara berkala dan menyediakan tempat (garasi) di masing-masing SKPD khusus mobil dinas operasional lapangan.
- c.) Memberikan surat teguran bagi para pegawai negeri sipil yang melanggar aturan tentang penggunaan mobil dinas di Sekretariat Kabupaten Kutai Barat.

2. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya, Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Barat menemui beberapa kendala yaitu:

- a.) Masih belum lengkapnya isi peraturan yang ada pada dalam Peraturan Daerah yang mengatur barang milik daerah khususnya pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga membuat pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas sendiri menjadi tidak maksimal.
- b.) Kurangnya kesadaran dari para pegawai negeri sipil tentang pemakaian mobil dinas dalam tugas pengabdian kepada masyarakat sehingga menghambat kinerja Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Sekeretariat

kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas di kabupaten Kutai Barat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penelitian ini merekomendasikan hendaknya peraturan daerah yang bersangkutan harus ditinjau ulang serta diperbaharui dengan kelengkapan aturan tentang pengawasan pada mobil dinas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas lebih terarah, sistematis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Sri Hartini, Hj. Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tim BAPPEDA Kabupaten Kutai Barat, 2012, *Profil Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012*, BAPPEDA Kabupaten Kutai Barat, Sendawar.

Tim HUMAS Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, 2008, *Kubar Membangun Masa Depan*, Bagian HUMAS Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Sendawar.

Victor M.Situmorang, Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.

YW.Sunindhia, Ninik Widiyanti, 1987, *Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat*, Bina Aksara, Jakarta.

Website :

<http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=66175>, diakses tanggal 27 Februari 2013.

<http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 26 Februari 2013

<http://www.kamusbesar.com/26047/mobil>, diakses tanggal 28 Februari 2013

<http://www.kamusbesar.com/9099/dinas>, diakses tanggal 28 Februari 2013

<http://www.kubarkab.go.id/profil.php?id=3>, diunduh tanggal 01 Maret 2013.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kutai Barat

